

# Partisipasi Politik Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Lubuk Tenam Jambi

<sup>1</sup>Siti Hardiyanti, <sup>2</sup>Asrinaldi, <sup>3</sup>Aidinil Zetra

<sup>123</sup>Program Magister Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas

email: sitihardiyanti499@gmail.com

## *Abstrak*

Partisipasi masyarakat memiliki posisi yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, karena pada dasarnya masyarakat adalah pihak yang paling mengetahui masalah dan kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu perencanaan pembangunan yang partisipatif menjadi amanat undang-undang yang harus dilaksanakan oleh pelaku pembangunan yang diregulasikan melalui Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Regulasi produk hukum ini sekaligus meretas kebuntuan paradigma pembangunan *top-down* menjadi pembangunan *bottom-up*. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan pembangunan model *bottom-up*, dimana model ini adalah partisipatoris, yaitu model melibatkan masyarakat dalam rangkaian proses perencanaan pembangunan yang dalam penelitian ini melihat partisipasi politik dalam pembangunan di Desa Lubuk Tenam, Jambi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa perencanaan partisipatif dalam pembangunan daerah belum dilaksanakan dengan baik ditandai dengan keengganan masyarakat ikut berpartisipasi, kemampuan aparat dan masyarakat dalam melaksanakan perencanaan partisipatif belum memadai dan tim delegasi Desa Lubuk Tenam belum mempunyai kemampuan untuk negosiasi pada musrenbang kecamatan maupun kabupaten sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat dan pemerintah mempunyai peran terkait rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

**Kata kunci :** *Partisipasi Masyarakat, Perencanaan Pembangunan, Desa Lubuk Tenam*

## *Abstract*

*Community participation has a very important position in development planning, because basically the community is the party who best knows their own problems and needs. Therefore, participatory development planning is a mandate of law that must be implemented by development actors which is regulated through Law Number 25 of 2004 concerning the National Development Planning System. This regulation of legal products at the same time breaks the deadlock of the top-down development paradigm into bottom-up development. This research method uses a qualitative descriptive method with a bottom-up model development approach, where this model is participatory, namely a model involving the community in a series of development planning processes which in this study looks at political participation in development in Lubuk Tenam Village, Jambi. Based on the results of research conducted that participatory planning in regional development has not been carried out properly, it is marked by the reluctance of the community to participate, the ability of the apparatus and the community to carry out participatory planning is inadequate and the Lubuk Tenam Village delegation team does not yet have the ability to negotiate at the sub-district and district musrenbang so that they can it is concluded that the community and government have a role related to the low participation of the community in development planning.*

**Keywords :** *Community Participation, Development Planning, Lubuk Tenam Village*

## 1. PENDAHULUAN

Pada era reformasi sekarang ini perubahan tentang prinsip-prinsip penentuan suatu rencana pembangunan mulai dilakukan. Penerapan model *bottom up* yang "benar" mulai dirintis. Aspirasi masyarakat maupun daerah mulai jadi pertimbangan utama dalam penentuan pembangunan di daerah yang bersangkutan. Terutama dengan pemberlakuan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan momen awal pelaksanaan otonomi daerah, yakni kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (UU Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 1 ayat 6). Implementasi dari UU Nomor 32 Tahun 2004 tersebut merupakan pelaksanaan desentralisasi pembangunan yang bertujuan untuk menciptakan pemerataan hasil-hasil pembangunan yang bertumpu pada keterlibatan, kemampuan, dan peran serta masyarakat di daerah, untuk mencapai keberhasilan pembangunan maka banyak aspek atau hal-hal yang harus diperhatikan, diantaranya adalah keterlibatan masyarakat di dalam pembangunan, asumsi para pakar yang berpendapat semakin tinggi kepedulian atau partisipasi masyarakat pada proses- proses perencanaan akan memberikan output yang lebih optimal, semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan yang akan dicapai.

Pembangunan Desa adalah jalan yang paling mungkin untuk mengubah wajah desa, mengubah hidup dan kehidupan rakyat desa, agar menjadi lebih baik, lebih adil dan lebih bermakna. Pembangunan desa yang telah berlangsung sejak beberapa Dasawarsa telah menjadi instrumen penting, yang membawa dampak sangat luas pada kehidupan masyarakat pada umumnya, dan warga desa pada khususnya.

Hal yang menjadi masalah kemudian adalah bahwa proses pembangunan desa yang berjalan, tidak menjadikan desa berubah, berkembang menjadi lebih baik dan lebih bermakna, tetapi malah sebaliknya. partisipasi politik pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang diambil pemerintah. istilah "partisipasi politik" telah digunakan dalam berbagai pengertian yang berkaitan dengan perilaku, sikap dan persepsi yang merupakan syarat mutlak bagi partisipasi politik (Puspika, 2020: 12).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik masyarakat merupakan indikator utama dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Pendapat atau teori tersebut secara rasional dapat diterima, karena secara ideal tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu sangatlah pantas masyarakat terlibat di dalamnya. (Easterly, 2007) agar tercapainya keberhasilan pembangunan tersebut maka segala program perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pembangunan harus melibatkan masyarakat, karena merekalah yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun wilayahnya serta mereka juga yang nantinya akan memanfaatkan dan menilai tentang berhasil tidaknya pembangunan di wilayah mereka. Tjokroamidjojo (1996) menyimpulkan bahwa pembangunan nasional merupakan: (1) proses pembangunan berbagai bidang kehidupan, baik sosial, ekonomi, politik dan lainnya; (2) proses perubahan sosial yang merupakan proses perubahan masyarakat dalam berbagai kehidupannya ke arah yang lebih baik, lebih maju, dan lebih adil; (3) proses pembangunan dari, oleh dan untuk masyarakat atau adanya partisipasi aktif masyarakat. Uraian mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan sejalan dengan pendapat Conyers (1991) yang lebih lanjut mengemukakan 3 (tiga) alasan utama mengapa partisipasi masyarakat dalam perencanaan mempunyai sifat yang sangat penting :

2. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat.

3. Masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan apabila mereka dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program kegiatan tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program kegiatan tersebut.
4. Mendorong partisipasi umum karena akan timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan.

Pendekatan top-down dan partisipatif dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 terwujud dalam bentuk rangkaian partisipasi politik dalam kegiatan musrenbang yang dilakukan secara berjenjang dari mulai tingkat Desa Lubuk Tenam, Jambi (musrenbangdes), kecamatan (musrenbang kecamatan) dan kabupaten (musrenbang kabupaten). Rangkaian forum ini menjadi bagian dalam menyusun sistem perencanaan dan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan setiap tahun. Melalui musrenbang, masyarakat berpeluang menyampaikan aspirasi mereka dan berpartisipasi dalam menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian musrenbang sebagai bentuk proses perencanaan pembangunan merupakan wahana publik (public event) yang penting untuk membawa para pemangku kepentingan (stakeholders) memahami isu-isu dan permasalahan daerah mencapai kesepakatan atas prioritas pembangunan, dan konsensus untuk pemecahan berbagai masalah pembangunan daerah. Musrenbang juga merupakan wahana untuk mensinkronisasikan pendekatan “top down” dengan “bottom up” pendekatan penilaian kebutuhan masyarakat (community need assessment) dengan penilaian yang bersifat teknis (technical assessment), resolusi konflik atas berbagai kepentingan pemerintah daerah dan non government stakeholder untuk pembangunan daerah, antara kebutuhan program pembangunan dengan kemampuan dan kendala pendanaan, dan wahana untuk mensinergikan berbagai sumber pendanaan pembangunan.

Pada penjelasan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menjelaskan pada tahap perencanaan pembangunan yang diawali proses penyusunan rencana yang berbunyi:”melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing- masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Diawali dengan penyelenggaraan musrenbang tingkat Desa Lubuk Tenam, Jambi, musrenbang tingkat kecamatan hingga musrenbang tingkat kabupaten. Terkait dengan hal tersebut, berdasarkan penelitian terdahulu ada fenomena menarik dalam proses perencanaan pembangunan, antara lain adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap arti penting pelaksanaan proses perencanaan pembangunan yang belum diketahui dan dimengerti oleh sebagian besar peserta terutama mengenai bagaimana proses musrenbang, kegiatan seperti apa yang harus diusulkan, untuk kepentingan apa dan sebagainya.

Mekanisme perencanaan pembangunan yang seharusnya diawali mulai dari musrenbang Desa Lubuk Tenam, Jambi/ kelurahan belum sepenuhnya dilaksanakan oleh masing-masing Desa Lubuk Tenam, Jambi atau kelurahan sehingga belum melibatkan masyarakat untuk pengusulan kegiatan bahkan pada pelaksanaan musrenbang kecamatan ada kecenderungan bahwa usulan yang diajukan merupakan rumusan elite Desa Lubuk Tenam, Jambi/kelurahan, sehingga partisipasi masyarakat yang sesungguhnya masih jauh dari harapan yang ditandai dengan tidak adanya acara penentuan prioritas kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dalam forum musrenbang, selain itu dalam proses perencanaan pembangunan belum diawali dengan kegiatan pendahuluan atau penyelidikan untuk mendapatkan data yang valid mengenai potensi, masalah, dan kebutuhan masyarakat sedangkan hal menarik lainnya adalah adanya kecenderungan tingkat kehadiran pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan seperti tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh pemuda relatif rendah, dan tingkat keaktifan peserta relatif rendah serta tim delegasi Desa Lubuk Tenam, Jambi belum mempunyai kemampuan untuk negosiasi pada musrenbang kecamatan.

Hal menarik lainnya adalah adanya kecenderungan tingkat kehadiran pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan seperti tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh pemuda relatif rendah, dan tingkat keaktifan peserta relatif rendah serta tim delegasi Desa Lubuk Tenam, Jambi belum mempunyai kemampuan untuk negosiasi pada musrenbang pada tingkat kecamatan. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada latar belakang diatas, maka rumusan permasalahan penelitian ini adalah bagaimana partisipasi politik masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di Desa Lubuk Tenam, Jambi?

## 2. METODE

Dalam penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. (Lexy J. Moleong, 2004).

Pada penelitian deskriptif kualitatif yang melihat partisipasi politik dalam pembangunan masyarakat di Desa Lubuk Tenam, Jambi ini data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar bukan angka-angka. Kalaupun ada angka hanya sebagai penunjang. Data yang diperoleh meliputi transkrip interview, catatan lapangan, foto dokumen pribadi dan lain-lain (Sudarwan Danim, 2009).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada hasil penelitian ini peneliti akan berusaha untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan perencanaan partisipatif. Sesuai dengan fokus masalah yang telah ditetapkan, analisis terhadap pelaksanaan perencanaan partisipatif dalam proses perencanaan pembangunan ini dilihat dari fokus perencanaan, partisipasi masyarakat, sinergitas perencanaan, dan legalitas perencanaan.

Untuk menganalisis hasil penelitian digunakan pendapat Wicaksono dan Sugiarto (Wijaya, 2001) sebagai acuan analisis yang mengemukakan bahwa perencanaan partisipatif adalah usaha yang dilakukan masyarakat untuk memecahkan masalah yang dihadapi agar mencapai kondisi yang diharapkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan secara mandiri. Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, analisis yang digunakan adalah berdasarkan: Fokus perencanaan, berdasarkan pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat serta memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka. Pada pelaksanaan perencanaan partisipatif di kecamatan dilakukan dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan tahunan kecamatan berupa daftar prioritas kegiatan kecamatan yang berasal dari usulan prioritas Desa Lubuk Tenam, Jambi/kelurahan dan akan disampaikan pada proses yang lebih tinggi. Tujuan dari kegiatan perencanaan partisipatif itu sendiri adalah: Menentukan arah dan tujuan kegiatan perencanaan pembangunan oleh masyarakat.

Berbeda dengan penelitian Lusi Puspika Sari (2020), penulis melihat hal yang berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu, lebih melihat pada pengaruh partisipasinya. Partisipasi masyarakat menentukan dalam pembentukan ruang publik, partisipasi politik pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang diambil pemerintah nagari (*desa dalam bahasa Minangkabau*). Partisipasi masyarakat ini juga mempengaruhi dalam berlangsungnya pembangunan

di Nagari ini. Karna pembangunan yang bersifat partisipatif sangat tergantung dengan partisipasi masyarakat

Mekanisme perencanaan pembangunan yang seharusnya diawali mulai dari partisipasi politik musrenbang Desa Lubuk Tenam, Jambi/ kelurahan belum sepenuhnya dilaksanakan oleh masing-masing Desa Lubuk Tenam, Jambi atau kelurahan sehingga belum melibatkan masyarakat untuk pengusulan kegiatan bahkan pada pelaksanaan musrenbang kecamatan ada kecenderungan bahwa usulan yang diajukan merupakan rumusan elite Desa Lubuk Tenam, Jambi/kelurahan, sehingga partisipasi masyarakat yang sesungguhnya masih jauh dari harapan yang ditandai dengan tidak adanya acara penentuan prioritas kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dalam forum musrenbang, selain itu dalam proses perencanaan pembangunan belum diawali dengan kegiatan pendahuluan atau penyelidikan untuk mendapatkan data yang valid mengenai potensi, masalah, dan kebutuhan masyarakat sedangkan hal menarik lainnya adalah adanya kecenderungan tingkat kehadiran pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan seperti tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh pemuda relatif rendah, dan tingkat keaktifan peserta relatif rendah serta tim delegasi Desa Lubuk Tenam, Jambi belum mempunyai kemampuan untuk negosiasi pada musrenbang kecamatan.

Teridentifikasi jenis-jenis usulan dan rencana kegiatan berdasarkan pada kekuatan dan potensi yang ada serta kebutuhan riil masyarakat, teridentifikasi rencana program masyarakat dalam pembangunan, perencanaan partisipatif dimulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan, dan keluaran perencanaan pembangunan. Masyarakat diharapkan terlibat dan memahami seluruh rangkaian dari proses perencanaan pembangunan. Fokus perencanaan yang berdasarkan masalah dan kebutuhan masyarakat dapat diperoleh melalui kegiatan penyelidikan masalah dan kebutuhan mulai dari tingkat dusun/ lingkungan yang merupakan bagian dari tahap persiapan dalam proses perencanaan pembangunan. Berdasarkan hasil penelitian, untuk beberapa Desa Lubuk Tenam, Jambi melakukan kegiatan penyelidikan masalah dan kebutuhan masyarakat mulai tingkat dusun sehingga diperoleh profil masalah dan kebutuhan masyarakat, namun untuk sebagian Desa Lubuk Tenam, Jambi lainnya jenis usulan yang diajukan didiskusikan pada saat pelaksanaan musrenbang Desa Lubuk Tenam, Jambi, dan bukan digali dari kelompok-kelompok masyarakat. Perencanaan yang disiapkan belum memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat dilakukan pada tingkat Desa Lubuk Tenam, Jambi/ kelurahan yang artinya hanya perwakilan masyarakat yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan namun tidak dilibatkan dalam penetapan daftar prioritas masalah dan kebutuhan Desa Lubuk Tenam, Jambi/ lingkungan yang akan disampaikan pada proses perencanaan pembangunan (musrenbang) kecamatan.

Partisipasi masyarakat dimana setiap masyarakat memperoleh peluang yang sama dalam sumbangan pemikiran tanpa dihambat oleh kemampuan berbicara, waktu dan tempat. Dalam hal ini idealnya masyarakat dilibatkan dalam memutuskan kegiatan mana yang dianggap prioritas untuk diajukan ke musrenbang yang lebih tinggi. Berdasarkan hasil penelitian keterlibatan masyarakat dalam forum musrenbang baik tingkat Desa Lubuk Tenam, Jambi maupun tingkat kecamatan adalah rendah. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan bukan hanya berasal dari faktor masyarakat tapi ada juga kelemahan dari pemerintah.

#### **1) Dari sisi masyarakat kendalanya adalah:**

- a) Keterbatasan masyarakat terhadap pemahaman perencanaan pembangunan.
- b) Adanya sikap pesimis dan apatis masyarakat terhadap proses perencanaan pembangunan karena usulan mereka tidak terakomodasi dalam proses yang lebih tinggi.
- c) Kesibukan masyarakat dalam mencari nafkah sehingga tidak memiliki waktu untuk

ikut terlibat dalam proses perencanaan pembangunan.

d) Budaya paternalisme atau takut bertindak beda.

**2) Sedangkan kendala dari sisi pemerintah adalah :**

a) Lemahnya komitmen politik penguasa.

b) Lemahnya dukungan sumberdaya manusia yang dapat diandalkan.

c) Lemahnya dukungan anggaran.

d) Rendahnya kemampuan lembaga legislatif dalam mengakomodir aspirasi konstituennya.

Sehingga dengan rendahnya keterlibatan masyarakat merupakan salah satu indikator kurang berhasilnya pelaksanaan perencanaan partisipatif. Perencanaan yang bersifat dinamis akan diperoleh melalui proses berkelanjutan dan adanya proaktif masyarakat yang tentunya mencerminkan kepentingan dan kebutuhan semua pihak.

Dengan adanya ruang partisipasi yang lebih terbuka mendorong masyarakat untuk bergerak bersama dalam menyampaikan aspirasinya. Peran proaktif dan dilakukan secara kolektif akan membuat suara masyarakat lebih terdengar dan membuka peluang untuk memberikan pengaruh terhadap keputusan-keputusan institusi soal pelayanan publik. Aksi kolektif mendorong masyarakat lebih siap untuk terlibat dalam proses partisipasi.

Berdasarkan musrenbang di tahun sebelumnya, dengan kurang diakomodasinya hasil musrenbang kecamatan yang bersumber dari usulan Desa Lubuk Tenam, Jambi/kelurahan ke dalam rencana kerja SKPD menjadi faktor pemicu rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti pelaksanaan musrenbang. Hal ini menunjukkan belum adanya ruang partisipasi yang lebih terbuka yang dapat mendorong masyarakat untuk bergerak bersama dalam menyampaikan aspirasinya.

Sinergitas perencanaan yaitu selalu menekankan kerja sama antar wilayah dan geografi, serta interaksi diantara stakeholders. Pada pelaksanaan perencanaan partisipatif dalam proses perencanaan pembangunan, proses pengambilan keputusan yang diselenggarakan di tingkat Desa Lubuk Tenam, Jambi dan kecamatan secara formal telah dilakukan dengan baik meskipun ada beberapa tahapan dalam proses perencanaan pembangunan tidak dilaksanakan. Bila dilihat dari sisi peserta, belum mewakili unsur masyarakat, terlebih dalam proses perencanaan kecamatan, tingkat keterwakilan masyarakat masih rendah. Namun bila dilihat dari dokumen sebagai bahan masukan dalam proses perencanaan pembangunan tingkat kecamatan, sudah tersedia beberapa kelengkapan seperti daftar prioritas permasalahan/kegiatan Desa Lubuk Tenam, Jambi/kelurahan.

Hasil kesepakatan peserta musrenbang kecamatan berupa daftar prioritas usulan/kegiatan kecamatan yang merupakan hasil kerja sama antar wilayah administrasi dan geografi serta merupakan hasil interaksi antara stakeholders, pada umumnya dapat diterima peserta musrenbang khususnya dan masyarakat Kecamatan Pasar Muara Bungo umumnya. Legalitas perencanaan dimana perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan mengacu pada semua peraturan yang berlaku, menjunjung etika dan tata nilai masyarakat serta tidak memberikan peluang bagi penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Penyelenggaraan proses perencanaan pembangunan tingkat kecamatan merupakan tanggung jawab kecamatan dibantu oleh perangkat kecamatan. Proses perencanaan pembangunan secara umum belum dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis musrenbang. Dapat dilihat dari: (1) ada beberapa tahapan proses perencanaan pembangunan yang tidak diselenggarakan dalam proses perencanaan pembangunan kecamatan; (2) proses perencanaan pembangunan belum melibatkan unsur masyarakat secara keseluruhan;

(3) penetapan usulan prioritas belum melibatkan peserta musrenbang, karena keluaran sudah dibuat oleh pihak kecamatan berdasarkan daftar prioritas usulan/kegiatan Desa Lubuk Tenam, Jambi/kelurahan yang sudah masuk ke kecamatan sebelum proses perencanaan pembangunan dijadwalkan.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat itu sendiri, diantaranya meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pelaksanaan program pembangunan, agar kondisi kehidupan masyarakat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan, memberi kekuasaan atau mendelegasikan kewenangan kepada masyarakat agar masyarakat memiliki kemandirian dalam pengambilan keputusan untuk membangun diri dan lingkungannya. Dengan demikian upaya melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan berarti memampukan dan memandirikan masyarakat itu sendiri. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan masih rendah. Banyak faktor yang mempengaruhinya. Rendahnya partisipasi masyarakat akan mempengaruhi kesuksesan pelaksanaan perencanaan pembangunan, yang berarti peningkatan kualitas kehidupan sosial ekonomi, politik, lingkungan masyarakat yang salah satunya tercermin dari peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat belum tentu terlaksana dengan baik.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang telah disajikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan masih rendah, dipengaruhi oleh faktor sebagai berikut

- 1) Keterbatasan masyarakat terhadap pemahaman perencanaan pembangunan, tidak adanya asas persamaan di dalam forum musrenbang pada saat penyampaian gagasan, adanya sikap pesimis dan apatis masyarakat terhadap proses perencanaan pembangunan karena usulan–usulan mereka tidak terakomodasi. Waktu kerja sebagian masyarakat yang berbenturan dengan waktu penyelenggaraan perencanaan pembangunan.
- 2) Proses perencanaan pembangunan belum dilaksanakan secara optimal, dengan uraian sebagai berikut: pada tahapan musyawarah pra musrenbang yakni pada proses penyelidikan masalah dan kebutuhan masyarakat belum dilakukan dengan maksimal, Perencanaan pembangunan belum berdasarkan pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat, sosialisasi perencanaan pembangunan tidak dilakukan oleh pemerintah Desa Lubuk Tenam, Jambi/kelurahan kepada masyarakat secara luas, agenda pembahasan dan penetapan usulan prioritas ke jenjang musrenbang yang lebih tinggi belum sepenuhnya dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, dan tahap pelaksanaan musrenbang masih mengadopsi mekanisme tahun sebelumnya.

#### 5. SARAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan masih rendah. Oleh karena itu Desa Lubuk Tenam, dengan kecamatan Muaro Bungo harus bisa melaksanakan musrembang secara efektif untuk bisa mengelola banyak faktor yang mempengaruhinya. Rendahnya partisipasi masyarakat akan mempengaruhi kesuksesan pelaksanaan perencanaan pembangunan, yang berarti peningkatan kualitas kehidupan sosial ekonomi, politik, lingkungan masyarakat yang salah satunya tercermin dari peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat belum tentu terlaksana dengan baik.

**DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Easterly, Wilian, (2007) *The Ideology of Development*, Foreign Policy, July/Augustus
- [2] Evi Fussalam, Y., Ridho Kurniawan, Deka Ismi, & Zulmi. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga di Desa Lubuk Tenam. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1 (1), 8-15
- [3] Paskarina, Carolline. (2005). "Dilema Ruang Publik Dalam Demokratisasi." *Bujet: Volume 3, Nomor*
- [4]. Puspika Sari, L., Aidil Zetra, & Tengku Rika Valentina. (2020). Peran Ruang Publik Dalam Meningkatkan Pasrtisipasi Politik Di Nagari Talang Anau. *Jurnal Niara*, 13(2), 11-22.
- [5]. Sastropetro, Santoso, R.A., Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional, Alumni: Bandung, 1988.
- [6]. Paskarina, Carolline. (2005). "Dilema Ruang Publik Dalam Demokratisasi." *Bujet: Volume 3, Nomor*
- [7]. Thamrin, Djuni. (2017). "Membuka Ruang Baru Demokrasi Partisipatif Bagi Community Policing: Peran Forum Warga." *Jurnal Keamanan Nasional*. Volume 3, (1).
- [8]. Tjokroamidjojo, Bintoro, (1996) *Perencanaan Pembangunan*, Cetakan Kelima, Penerbit PT Toko Gunung Agung: Jakarta, 1996.
- [9]. Wijaya, Rina, (2001). *Forum Pengambilan Keputusan dalam Proses Perencanaan Pembangunan di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Di Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta)*, Tesis Magister Perencanaan Kota dan Daerah, Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta.